

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
(RENJA-P)
KECAMATAN TEMPURSARI**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN TEMPURSARI
TAHUN
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat karunia-NYA kami dapat menyelesaikan Penyusunan Perubahan Rencana Kinerja Kecamatan Tempursari dan menuliskan hasilnya dalam bentuk buku yang berjudul “PERUBAHAN RENCANA KINERJA (RENJA-P) KECAMATAN TEMPURSARI KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021”.

Perubahan Rencana Kinerja ini secara garis besar mengupas tentang Visi, Misi, Tujuan serta sasaran dan target Perubahan Rencana Kinerja Kecamatan Tempursari, selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan Perubahan Rencana Kinerja yang ingin dicapai.

Dengan segala keterbatasan, perumusan Dokumen Perubahan Rencana Kinerja (Perubahan RENJA) ini, tak mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu disini.

Kami menyadari bahwa Perubahan Rencana Kinerja ini masih banyak kekurangannya, namun demikian kami berharap dengan Perubahan Rencana Kinerja (Perubahan RENJA) ini semua kebijakan Program dan Kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen, baik Aparatur Pemerintah Kabupaten Lumajang maupun masyarakat serta DPRD, agar dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Perubahan Rencana Kinerja ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Tempursari maupun pihak lain yang memerlukannya.

Tempursari, 29 September 2021

CAMAT TEMPURSARI



Drs. AGUS SAMSUL HADI
NIP. 19660228 199203 1 012

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	34
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	36
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	49
3.1 Program Utama.....	49
3.2 Sasaran dan Target Kinerja.....	50
3.2 Alokasi Anggaran.....	52
BAB IV PENUTUP	55
LAMPIRAN	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah , rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah mengamanatkan adanya penyempurnaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan perencanaan di tingkat pusat dan daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan tersebut, Kepala BAPPEDA mengkoordinasikan Penyusunan RKPD Perubahan menggunakan Renja Perubahan SKPD dengan Kepala SKPD, yang dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dalam periode satu tahun anggaran.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan merupakan dokumen rencana kinerja yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan yang

telah dievaluasi sebelumnya dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.1.1.Pengertian Renja Perubahan

Dokumen Rencana Kerja Perubahan merupakan hasil tindak lanjut evaluasi pelaksanaan/capaian Rencana Kerja Tahun 2021 sampai dengan Tribulan II.

Rencana Kerja Perubahan ini selanjutnya menjadi pedoman baru dalam menentukan langkah-langkah yang akan datang tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Rencana Kerja Perubahan merupakan pengejawantahan dan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra). Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tempursari menggambarkan penyesuaian Rencana Kerja berdasarkan sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mendukung percepatan pencapaian target sasaran daerah dengan efektif dan efisien sesuai rencana strategis yang telah ditetapkan.

1.1.2.Proses Penyusunan Renja

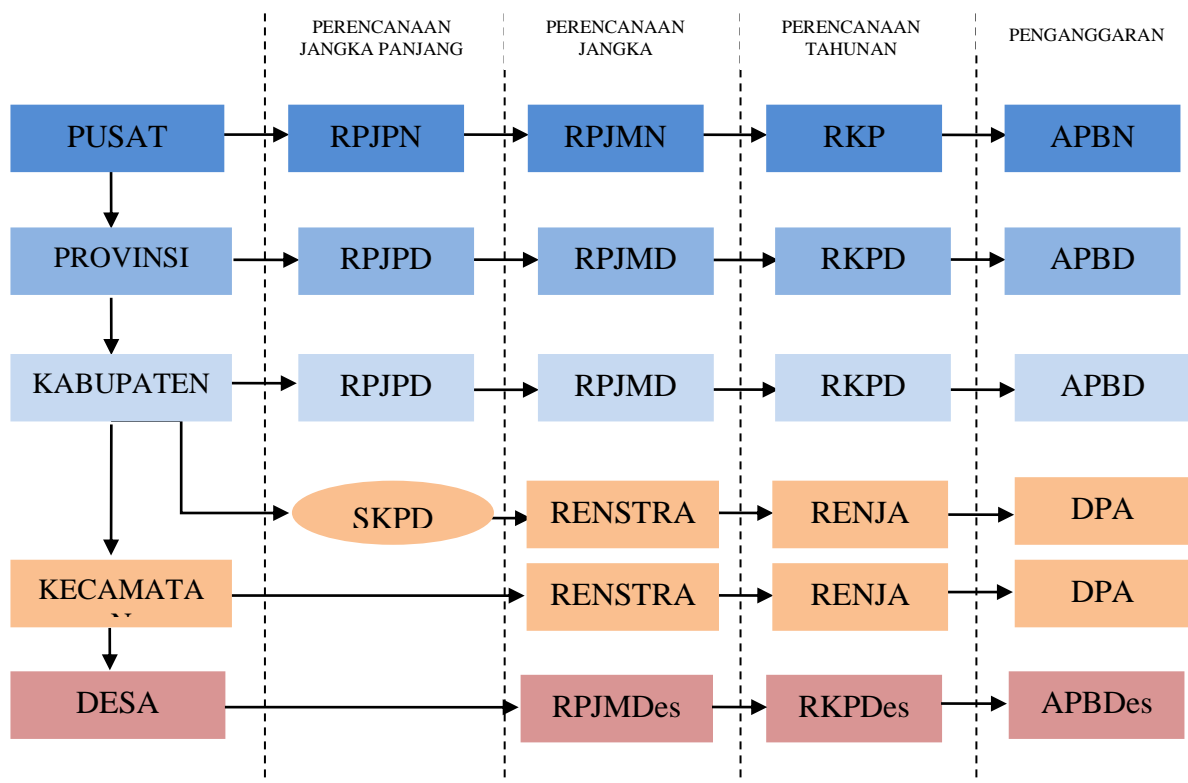
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perubahan OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan perubahan RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perubahan OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan perubahan RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD pada tribulan sebelumnya dalam periode satu tahun dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perubahan OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja Perubahan OPD untuk menjadi pedoman baru di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2.Keterkaitan Antara Renja Perubahan OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dengan telah disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2019 -2023 yang merupakan penjabaran visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Lumajang hasil pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung, maka RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2019 – 2023 merupakan pedoman bagi Badan / Dinas / Kantor / Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Renstra OPD Tahun 2019 – 2023.

Renstra OPD Tahun 2019 – 2023 di dalamnya merupakan penjabaran visi, misi, sasaran, tujuan, program dan kegiatan satuan kerja dalam kurun waktu lima tahun. Renstra selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bagi satuan kerja

Hubungan antar dokumen perencanaan dapat di ilustrasikan pada gambar dibawah ini, gambar tersebut mengilustrasikan pola hubungan antar dokumen perencanaan pada level pemerintah pusat sampai dengan desa dan dapat kita analisa keterkaitan antar seluruh dokumen perencanaan.



Gambar 1.1

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4355);
5. Undang – undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang - undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang – undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005 - 2025
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Lumajang 2019-2023.
16. Peraturan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tempursari adalah sebagai Dokumen Rencana Kinerja untuk 1 (Satu) Periode Tahun Anggaran

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kinerja Perubahan Kecamatan Tempursari adalah untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan,

Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilengkapi dengan penyesuaian sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dengan prakiraan maju untuk Tahun Anggaran berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perubahan Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang terdiri dari 5 (Lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan Renja Perubahan OPD, landasan hukum, serta sistematika penulisan;

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Berisi tentang Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 sampai dengan triwulan II dan perkiraan capaian tahun 2022;

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan;

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang uraian penutup.

Lampiran

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2021 sampai dengan triwulan II berdasarkan target indikator kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan triwulan II adalah 45,88% dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.757.561.567,-.

Capaian Program ini didukung oleh realisasi 6 (enam) kegiatan adalah sebagai berikut :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki realisasi 18,81% dari rencana anggaran sebesar Rp. 6.650.750,-. Hal ini dikarenakan sebagian besar alokasi anggaran kegiatan ini terlaksana pada triwulan III.
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki realisasi 52,21% dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.213.973.207,-.
- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah memiliki realisasi 0,00% dari rencana anggaran Rp. 1.296.000,-. Hal ini disebabkan anggaran kegiatan ini telah difokuskan.
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki realisasi 27,78% dari rencana anggaran sebesar Rp. 186.175.600. Hal ini disebabkan penyelenggaraan rapat di Kecamatan sebagai alokasi anggaran terbesar dalam kegiatan ini terhambat akibat dampak langsung dari pembatasan kegiatan kerumunan massa selama masa pandemic Covid-19
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki realisasi 41,79% dari rencana anggaran sebesar Rp. 247.631.800,-.

f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki realisasi 15,86% dari rencana anggaran Rp.101.834.300,-. Hal ini disebabkan anggaran sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya telah difokuskan sebesar Rp. 47.805.000,

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Realisasi Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sampai dengan triwulan II adalah 30,92% dari rencana anggaran sebesar Rp. 22.542.000,-.

Capaian Program ini didukung oleh realisasi 3 (tiga) kegiatan adalah sebagai berikut :

- a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan memiliki realisasi 50,00% dari rencana anggaran Rp. 900.000,-
- b) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum memiliki realisasi 56,06% dari rencana anggaran Rp.330.000,-
- c) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dilimpahkan kepada Camat memiliki realisasi 29,72% dari rencana anggaran Rp.21.312.000,-

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Realisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sampai dengan triwulan II adalah 11,69% dari rencana anggaran sebesar Rp. 84.441.000,-.

Capaian Program ini hanya didukung oleh realisasi Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Rendahnya realisasi kegiatan ini disebabkan karena tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan akibat pembatasan kegiatan kerumunan massa selama masa pandemic Covid-19

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Realisasi Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sampai dengan triwulan II adalah 0,00% dari rencana anggaran

sebesar Rp. 1.400.000,-. Hal ini dikarenakan anggaran untuk program ini telah difokuskan

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Realisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sampai dengan triwulan II adalah 19,61% dari rencana anggaran sebesar Rp. 9.180.000,-.

Capaian Program ini hanya didukung oleh realisasi kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Rendahnya realisasi karena sisa pagu sudah habis untuk difokuskan.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Realisasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sampai dengan triwulan II adalah 48,45% dari rencana anggaran sebesar Rp. 178.320.000,-.

Capaian Program ini hanya didukung oleh realisasi kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program diatas, dapat diketahui bahwa realisasi program dan kegiatan Kecamatan Tempursari belum maksimal karena pelaksanaan kegiatan terhambat karena dampak pandemic virus Covid-19 dan refokuskan anggaran. Adapun evaluasi program dan kegiatan triwulan II secara rinci dituangkan dalam tabel berikut ini :

Tabel Form E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang
Periode Pelaksanaan Tahun 2021 Triwulan II

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		12					13 = 6 + 12	14 = 13/5 x 100%
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
1	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %	6,884,760,801			100 %	1,757,561,657	20.64 %	362,674,598	25.25 %	443,721,858	45.88 %	806,396,456	45.88 %	806,396,456	45.88 %	11.71 %	Kecamatan Tempursari

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD			3 Dokumen		1,050,000						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP			3 Dokumen		4,086,000						
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD			9 Dokumen		2,235,000						
	Jumlah fasilitasi penyusunan laporan dana spesifik			1 Fasilitasi		-						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan fasilitasi administrasi keuangan		100 %			4,022,370,087						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	15 ASN				3,943,945,787						
		12 ASN	100 %	1 Fasilitasi	3 Dokumen	1,213,973,207		1 Dokumen	1,251,000		- Dokumen	
		13 ASN	22.76 %	- Fasilitasi	- Dokumen	276,271,278		- Dokumen	- Dokumen		- Dokumen	
		13 ASN	29.45 %	- Fasilitasi	- Dokumen	357,525,238		1 Dokumen	1,251,000		- Dokumen	
		13 ASN	52.21 %	- Fasilitasi	- Dokumen	633,796,516		1 Dokumen	1,251,000		- Dokumen	
		13 ASN	52.21 %	- Fasilitasi	- Dokumen	633,796,516		1.00 Dokumen	1,251,000		- Dokumen	
		86.67 %	52.21 %	- Fasilitasi	- Dokumen	633,796,516		33.33 %	0.00 %		0.00 %	
		15.85 %	15.76 %	0.00 %	0.00 %			30.62 %	0.00 %		0.00 %	

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN					2		68,326,800			
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD					8		1,050,000			
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD					1		879,000			
	Jumlah fasilitasi pelaksanaan akuntansi SKPD					1		-			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun					1		4,454,000			
Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Laporan Tanggapan pemeriksaan					6		1,656,000			
2	laporan	501,000	1,346,000	1	kegiatan	1	1	-	270,000	-	20,026,800
2	laporan	501,000	-	-	kegiatan	-	-	-	-	-	5,006,700
-	laporan	-	1	jenis	kegiatan	-	-	-	-	-	1
-	laporan	-	1,346,000	jenis	kegiatan	-	-	-	-	-	1,668,900
2	laporan	501,000	1,346,000	1	kegiatan	1	1	-	-	-	1
2.00	laporan	501,000	1,346,000	1.00	kegiatan	-	-	-	-	-	6,675,600
33.33		%	100.00	%	0.00	%	0.00	%	0.00	%	50.00
30.25%			30.22%		0.00%		0.00%		0.00%		9.77%

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	90	%	839,361,800				88	%	247,631,800	21.09	%	51,251,247	41.79	%	103,476,365	41.79	%	103,476,365	46.43	%	12.33%			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitas jasa surat menyurat	1	Fasilitas	59,580,000				1	Fasilitas	18,000,000	1	Fasilitas	2,475,000	1	Fasilitas	825,000	1.00	Fasilitas	3,300,000	100.00	%	5.54%			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yang dibayar	4	Rekening	154,565,800				4	Rekening	46,415,800	4	Rekening	5,092,598	3	Rekening	5,426,187	4.00	Rekening	10,518,785	100.00	%	6.81%			
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah fasilitas jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3	Kegiatan	22,000,000				-	Kegiatan	-	-	Kegiatan	-	-	Kegiatan	-	-	Kegiatan	-	0.00	%	0.00%			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitas jasa pelayanan umum kantor	2	Fasilitas	603,216,000				2	Fasilitas	183,216,000	2	Fasilitas	44,657,520	2	Fasilitas	45,000,060	2.00	Fasilitas	89,657,580	100.00	%	14.86%			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	90	%	922,563,800				88	%	101,834,300	10.74	%	10,939,102	5.11	%	5,208,473	15.86	%	16,147,575	15.86	%	16,147,575	17.62	%	1.75%

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	90 %	16,000,000					0.00 %	-	0.00 %	-	0.00 %	-	0.00 %	-	0.00 %	-	0.00 %	-
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	1 Laporan	16,000,000					- Laporan	-	- Laporan	-	- Laporan	-	- Laporan	-	0.00 %	-	0.00 %	-
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	90 %	70,515,000					88 %	21,312,000	18.01 %	3,838,000	11.71 %	2,496,000	29.72 %	6,334,000	29.72 %	6,334,000	33.02 %	8.98%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan	1 Rekomendasi	6,984,000					1 Rekomendasi	2,112,000	1 Rekomendasi	522,000	- Rekomendasi	-	1 Rekomendasi	522,000	1.00 Rekomendasi	522,000	100.00 %	7.47%

		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	90 %	588,320,000				88 %	178,320,000	24.23 %	43,200,000	24.23 %	43,200,000	48.45 %	86,400,000	48.45 %	86,400,000	53.84 %	14.69%	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah desa terbina penyelenggaraan pemerintahan desa	7 desa	571,800,000				7 desa	172,800,000	7 desa	43,200,000	7 desa	43,200,000	7 desa	86,400,000	7.00 desa	86,400,000	100.00 %	15.11%	
		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah yang melaksanakan penjarangan perangkat desa	7 Desa	16,520,000				2 Desa	5,520,000	- Desa	-	- Desa	-	- Desa	-	- Desa	-	0.00 %	0.00%	
SOTK Lama																					
	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan dan operasional perkantoran	90 %	2,317,134,785					87 %	733,831,362							87.00 %	733,831,362	96.67 %	31.67%

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	Jumlah dokumen LAKIP yang tersusun	5	Dokumen	5,879,272	2	Dokumen	2,514,000									2.00	Dokumen	2,514,000	40.00	%	42.76%	
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	5	Dokumen	10,918,647	2	Dokumen	3,738,000									2.00	Dokumen	3,738,000	40.00	%	34.24%	
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang tersusun	5	Dokumen	21,384,193	2	Dokumen	11,345,000									2.00	Dokumen	11,345,000	40.00	%	53.05%	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase permohonan pelayanan administrasi masyarakat yang ditindaklanjuti	90	%	2,198,311,611	87	%	705,481,900									87.00	%	705,481,900	96.67	%	32.09%	
Peningkatan Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat	Persentase pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan yang ditindak lanjuti	90	%	418,069,260	87	%	151,019,000									87.00	%	151,019,000	96.67	%	36.12%	

Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	Jumlah Desa yang dimonitoring dan evaluasi terkait pembangunan	7 Desa	
	Persentase penyusunan dokumen administrasi pemerintahan dan keuangan desa yang di tindak lanjuti	90 %	
	Jumlah desa yang menyusun administrasi pemerintahan yang ditindak lanjuti	7 Desa	1,098,495,493
		7 Desa	379,356,500
		7.00 Desa	7.00 Desa
		100.00 %	100.00 %
		34.53%	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tempursari dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang yang telah tertuang dalam Renstra Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang Tahun 2019–2023.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang

NO	INDIKATOR	TARGET					Realisasi Capaian		Proyeksi		Cata tan Anal isis
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	
1	Nilai IKM Kecamatan	86	87	88	89	90	83,82	83,64	88	89	
2	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	85%	87%	88%	100%	
3	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87%	88%	100%	

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

Tabel 2.1

Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang

No	Indikator Kinerja	Jenis Data	Formulasi/Rumus Perhitungan	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Monitoring dan Evaluasi
1	Nilai IKM Kecamatan	Kuantitatif	<i>Nilai IKM Kecamatan</i>	Penghitungan hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Tempursari atas kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima.	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan survey secara berkala
2	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Kuantitatif	$\frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan dengan instansi/Lembaga lain yang terkait}} \times 100 \%$	Data bersumber dari seluruh Seksi dan Subag terhadap kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi secara berkala
3	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	Kuantitatif	$\frac{(\text{Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun APBDesa} + \text{Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu})}{(\text{Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan} \times 3 \text{ dokumen})} \times 100 \%$	Data bersumber dari Seksi Pemerintahan terhadap laporan desa yang telah diselesaikan.	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan dokumen administrasi pemerintahan desa secara berkala (Tribulan)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kedudukan Camat sebagai Kepala OPD tingkat Kecamatan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah yang berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dengan demikian, berdasar kepada regulasi yang telah dijabarkan diatas, maka terdapat beberapa isu-isu strategis yang menjadi pokok permasalahan yang harus dituntaskan dengan pendekatan menggunakan analisis lingkungan strategi (Analisis SWOT/Strenght, Weakness, Opportunity and Threat),

Identifikasi atas ke empat aspek positif dan negatif tersebut akan menentukan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hasil identifikasi yang diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada di Kecamatan Tempursari didapatkan permasalahan yang saat ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Penetapan Isu PD (T-B.35)		
Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
Kurang terpenuhinya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik dan operasional perkantoran kurang optimal	belum terpenuhinya Sarana dan prasarana pelayanan publik dan aparatur
	Kemampuan personal petugas pelayanan publik baik desa dan kecamatan masih belum optimal karena kurangnya bimtek dan pelatihan terkait pelayanan publik	Kurang maksimalnya kualitas pelayanan publik
	kesadaran untuk tertib administrasi kependudukan baik warga masyarakat maupun petugas masih belum maksimal	
	Tingkat kepuasan pelayanan publik belum mencapai Harapan IKM	
	Kurangnya Inovasi pelayanan publik	
Administrasi Pemerintahan Desa tidak terselesaikan secara tepat waktu		kurang optimal pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan desa

	kurang maksimalnya tingkat akuntabilitas administrasi keuangan desa	
	SDM Personil LINMAS belum terbina dan terlatih secara optimal	sinergitas kinerja FORKOMPIMKA serta SDM personil Linmas dan Satgas Kamdes yang belum memadai
	SDM Personil Satgas Keamanan Desa belum terbina dan terlatih secara optimal	
	Koordinasi peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum belum dilaksanakan secara optimal	
	Pembinaan dan pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat belum terfasilitasi dan terkoordinasi secara optimal	Belum optimalnya peran petugas dalam memfasilitasi kelompok masyarakat dan warga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat
	Pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat belum terfasilitasi dan terkoordinasi secara optimal	
	Pembangunan dan program pemerintah yang belum terealisasi secara tepat sasaran dan normatif	
	Sinkronisasi usulan dari masyarakat dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah belum terfasilitasi dan terkoordinasi	Belum optimalnya perencanaan pembangunan partisipatif dari masyarakat serta penanggulangan kemiskinan
	Bantuan Sosial pemerintah pusat dalam rangka penanggulangan kemiskinan kurang terfasilitasi dan terkoordinasi	

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RKPD Tahun 2021 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa beberapa program dan kegiatan mengalami perubahan dibandingkan dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Tabel T-C.31

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kecamatan Tempursari
Kabupaten Lumajang**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (PERUBAHAN)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	1,768,978,057	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	87,82%	1,553,583,587	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Kecamatan	100%	6,650,750	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Kecamatan	51.78%	3,443,750	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan	3 Jenis	549,000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan	-	0	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,192,750		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,192,750	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,998,000		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	0	

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	1 Dokumen	1,251,000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	1 Dokumen	1,251,000	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	3 Dokumen	660,000		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	-	0	
			Jumlah fasilitasi penyusunan laporan dana spesifik	1 Fasilitasi	-			Jumlah fasilitasi penyusunan laporan dana spesifik	-	0	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		persentase pemenuhan fasilitasi administrasi keuangan	100%	1,213,973,207	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		persentase pemenuhan fasilitasi administrasi keuangan	93.71%	1,137,650,637	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	12 ASN	1,191,524,407		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	10 ASN	1,125,637,737	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	1 Fasilitasi	20,026,800		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	1 Fasilitasi	10,013,400	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD	1 Dokumentasi	270,000		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD	-	0	

			Jumlah fasilitasi pelaksanaan akuntansi SKPD	1 kegiatan				Jumlah fasilitasi pelaksanaan akuntansi SKPD	-	0
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 jenis	1,346,000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 jenis	1,346,000
		Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Laporan Tanggapan pemeriksaan	2 laporan	501,000		Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Laporan Tanggapan pemeriksaan	1 laporan	501,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	4 Jenis	305,000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	3 Jenis	152,500
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	1,296,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	0.00%	0
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD	2 dokumen	238,000		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD	-	0
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan rekonsiliasi BMD	2 laporan	-		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan rekonsiliasi BMD	-	0

		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitas penatausahaan BMD	1 fasilitas	1,058,000		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitas penatausahaan BMD	-	0	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase pemenuhan fasilitas administrasi umum	100%	186,175,600	Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase pemenuhan fasilitas administrasi umum	73,35%	136,554,100	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	7 jenis	5,064,400		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	6 jenis	4,316,000	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan	35 Jenis	26,156,600		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan	35 Jenis	21,829,300	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	2 jenis	1,022,800		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	2 jenis	1,022,800	
			jumlah fasilitas penggandaan dokumen	2 Fasilitas				jumlah fasilitas penggandaan dokumen	2 Fasilitas		
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu	1 Fasilitas	6,358,800		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu	1 Fasilitas	9,974,000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitas rakor SKPD	3 Fasilitas	146,173,000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitas rakor SKPD	3 Fasilitas	98,612,000	
			Jumlah fasilitas koordinasi dan konsultasi	1 Fasilitas				Jumlah fasilitas koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Fasilitas		

			SKPD							
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	2 Jenis	1,400,000		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	2 Jenis	800,000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase fasilitasi pengadaan BMD	88%	11,416,400	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase fasilitasi pengadaan BMD	0.00%	0
		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan	2 Jenis	11,416,400		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan	-	0
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	88%	247,631,800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	94.21%	233,285,800
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat	1 Fasilitasi	18,000,000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat	1 Fasilitasi	9,000,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yang dibayar	4 Rekening	46,415,800		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yang dibayar	3 Rekening	41,069,800
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	2 Fasilitasi	183,216,000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	2 Fasilitasi	183,216,000

7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	88%	101,834,300	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	41.88%	42,649,300	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	8 Kendaraan	40,579,300		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	8 Kendaraan	38,599,300	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	12 Jenis	13,450,000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	2 Jenis	4,050,000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara	2 jenis	47,805,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara	-	0	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		persentase fasilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	88%	22,542,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		persentase fasilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	63.97%	14,420,000	
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase fasilitas penyelenggaraan pemerintah	88%	900,000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat		Persentase fasilitas penyelenggaraan pemerintah	100.00%	900,000	

			han tingkat kecamatan			Kecamatan		an tingkat kecamatan			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah laporan koordinasi lintas sektor	1 Laporan	900,000		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah laporan koordinasi lintas sektor	1 Laporan	900,000	
2	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Persentase fasilitas pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	88%	330,000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Persentase fasilitas pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	66.67%	220,000	
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	jumlah laporan koordinasi terkait pemeliharaan sarpras umum	2 Laporan	330,000		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	jumlah laporan koordinasi terkait pemeliharaan sarpras umum	1 Laporan	220,000	
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang dilimpahkan		88%	21,312,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang dilimpahkan		62.41%	13,300,000	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan	1 rekomendasi	2,112,000		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan	Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan	1 rekomendasi	704,000	

		Pelayanan Perizinan Non Usaha					Perizinan Non Usaha				
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	jumlah dokumen administrasi non perizinan diterbitkan	7 Dokumen	4,152,000		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	jumlah dokumen administrasi non perizinan diterbitkan	7 Dokumen	2,980,000	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	jumlah dokumen kependudukan yang difasilitasi	6 Dokumen	15,048,000		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	jumlah dokumen kependudukan yang difasilitasi	6 Dokumen	9,616,000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	88%	84,441,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	31.68%	26,754,250	
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	88%	84,441,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	31.68%	26,754,250	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah desa yang terfasilitasi musrenbang	7 desa	4,941,000		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah desa yang terfasilitasi srenbang	7 desa	4,941,000	

		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	jumlah usulan pembangunan yang diakomodir	7 usulan	600,000		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	jumlah usulan pembangunan yang diakomodir	-	0	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang terfasilitasi	10 kegiatan	78,900,000		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang terfasilitasi	2 kegiatan	21,813,250	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		persentase pemenuhan upaya trantibum	88%	1,400,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		persentase pemenuhan upaya trantibum	0.00%	0	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		persentase fasilitasi penyelenggaraan trantibum	88%	1,400,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		persentase fasilitasi penyelenggaraan trantibum	0.00%	0	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah	jumlah personil linmas terlatih trantibum	140 personil	1,400,000		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	jumlah personil linmas terlatih trantibum	-	0	

		kecamatan									
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	88%	9,180,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	19.61%	1,800,000	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		persentase fasilitasi urusan pemerintahan umum	88%	9,180,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		persentase fasilitasi urusan pemerintahan umum	19.61%	1,800,000	
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	jumlah fasilitasi tugas forkopimcam	1 kegiatan	9,180,000		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	jumlah fasilitasi tugas forkopimcam	1 kegiatan	1,800,000	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		persentase desa tertib administrasi	88%	178,320,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		persentase desa tertib administrasi	100%	178,320,000	
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	88%	178,320,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	100%	178,320,000	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah desa terbina penyelenggaraan pemerintahan desa	7 desa	172,800,000		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah desa terbina penyelenggaraan pemerintahan desa	7 desa	172,800,000	
		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian	Jumlah yang melaksanakan penjarangan	2 Desa	5,520,000		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah yang melaksanakan penjarangan perangkat	2 Desa	5,520,000	

		n Perangkat Desa	perangkat desa				desa			
--	--	---------------------	-------------------	--	--	--	------	--	--	--

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program Utama

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tempursari Tahun 2021 terdiri dari beberapa Program Utama sedangkan untuk mencapai sasaran dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana yang terurai di bawah ini:

Tabel 3.1
Program Utama dan Kegiatan
Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang Tahun 2021

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
		2. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan umum	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana dan prasarana pelayanan umum
		3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan 3. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa 2. Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
4.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4. Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
		3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan 4. Fasilitas Kunjungan Tamu 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6. Penyediaan Bahan/Material
		4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3.2. Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran yang ingin dicapai/dihasilkan dari Rencana Kerja Perubahan ini adalah dalam jangka waktu satu tahun. Adapun perinciannya sebagai berikut :

Tabel 3.2
Sasaran dan Indikator Kinerja
Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang Tahun 2021

No	Program	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemenuhan fasillitasi kebutuhan operasional perkantoran	Output : Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
			Jumlah dokumen LAKIP	1 Dokumen

			Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	10 ASN
			Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	1 Fasilitasi
			Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 jenis
			Jumlah Laporan Tanggapan pemeriksaan	1 laporan
			Jumlah Jenis Laporan Keuangan	3 Jenis
			Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	6 Jenis
			Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan	35 Jenis
			Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	2 jenis
			jumlah fasilitasi penggandaan dokumen	2 Fasilitasi
			Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1 Fasilitasi
			Jumlah fasilitasi rakor SKPD	3 Fasilitasi
			Jumlah fasilitasi korrdinasi dan konsultasi SKPD	1 Fasilitasi
			Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	2 Jenis
			Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat	1 Fasilitasi
			jumlah rekening yang dibayar	3 Rekening
			Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	2 Fasilitasi
			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	8 Kendaraan
			Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	2 Jenis
			<u>Outcome :</u> Nilai IKM Kecamatan	88
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	<u>Output :</u> Jumlah laporan koordinasi lintas sektor	1 Laporan
			jumlah laporan koordinasi terkait pemeliharaan sarpras umum	1 Laporan
			Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan	1 Rekomendasi
			jumlah dokumen administrasi non perizinan diterbitkan	7 Dokumen
			jumlah dokumen kependudukan yang difasilitasi	6 Dokumen
			<u>Outcome :</u> Nilai IKM Kecamatan	88
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa	<u>Output :</u> jumlah desa yang terfasilitasi musrenbang	7 desa

			Jumlah kegiatan pemberdayaan yang terfasilitasi Outcome : Nilai IKM Kecamatan	2 kegiatan 88
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya pemenuhan urusan pemerintahan umum	Output : jumlah fasilitasi tugas forkopimcam Outcome : Nilai IKM Kecamatan	1 kegiatan 88
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya ketertiban administrasi desa	Output : jumlah desa terbina penyelenggaraan pemerintahan desa	7 desa
			Jumlah yang melaksanakan penjangkauan perangkat desa Outcome : Nilai IKM Kecamatan	2 Desa 88

3.3. Alokasi Anggaran

Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Tempursari Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp. 2.064.861.057,-**. Namun, pada bulan September 2021 terlaksana perencanaan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sehingga jumlah anggaran setelah perubahan menjadi sebesar **Rp. 1.774.877.837 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah)**. Adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana pada lampiran Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021.

Tabel 3.3
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Tempursari
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Awal	Pagu Perubahan	Selisih
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	1.768.978.057	1.553.583.587	(215.394.470)
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Kecamatan	6.650.750	3.443.750	(3.207.000)
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan fasilitas administrasi keuangan	1.213.973.207	1.137.650.637	(76.322.570)
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah	1.296.000	0	(1.296.000)
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan fasilitas administrasi umum	186.175.600	136.554.100	(49.621.500)
e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitas pengadaan BMD	11.416.400	0	(11.416.400)
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	247.631.800	233.285.800	(14.346.000)
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	101.834.300	42.649.300	(59.185.000)
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	persentase fasilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	22.542.000	14.420.000	(8.122.000)
a	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase fasilitas penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	900.000	900.000	-

b	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase fasilitasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	330.000	220.000	(110.000)
c	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	21.312.000	13.300.000	(8.012.000)
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	84.441.000	26.754.250	(57.686.750)
a	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	84.441.000	26.754.250	(57.686.750)
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	persentase pemenuhan upaya trantibum	1.400.000	0	(1.400.000)
a	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase fasilitasi penyelenggaraan trantibum	1.400.000	0	(1.400.000)
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	9.180.000	1.800.000	(7.380.000)
a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase fasilitasi urusan pemerintahan umum	9.180.000	1.800.000	(7.380.000)
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase desa tertib administrasi	178.320.000	178.320.000	-
a	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	178.320.000	178.320.000	-
TOTAL			2.064.861.057	1.774.877.837	(289.983.220)

BAB V PENUTUP

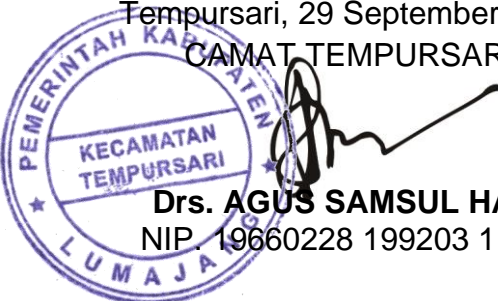
Sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya bahwa Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2021 merupakan hasil tindak lanjut dari evaluasi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 triwulan II dan merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang tahun 2019-2023. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target Tahun 2021.

Dengan harapan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2021 yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang dapat tercapai.

Kami berharap dukungan dari seluruh pelaku pembangunan dan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan pelaksanaan Rencana Kerja ini, sehingga dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi semua kalangan, khususnya untuk masyarakat di wilayah Kecamatan Tempursari dan masyarakat Kabupaten Lumajang pada umumnya.

Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat memberikan manfaat kepada kita dalam melaksanakan program/kegiatan dan sekaligus dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk segenap pihak khususnya bagi aparat Kecamatan Tempursari.

Tempursari, 29 September 2021
CAMAT TEMPURSARI



Drs. AGUS SAMSUL HADI
NIP. 19660228 199203 1 012

